Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

ANALISIS YURIDIS PELUANG PARTISIPASI *DESA ADAT* DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi*

ari_atudewi@unud.ac.id

Gusti Ayu Kade Komalasari**

komalasari_51@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Participation formation of the law to be understood as law formation that involving the community in every stage process. Within formation of the law to involve formal actor and non formal actor. Formal actors are executive, legislative and judicative. Non formal actors are the communities and desa adat. In this research will be explained arrangement of the desa adat participation opportunity and the stage of desa adat participation. The research uses normative legal methods with statue approach and legal hermeneutic approach. The results of the research show that there is a clear arrangement about opportunities participation of desa adat in law formation. Arrangement opportunities participation in legal instruments have fulfilled the purpose of law and also philosophy, sociology and juridical. The forming of desa adat opportunities participation within law formation be at stage of ante legislative, legislative and post legislative.

Keywords : *Opportunity, Participation, Desa Adat, Formation of law.*

ABSTRAK

Pembentukan hukum yang partisipatif dipahami sebagai pembentukan hukum yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembentukan hukum. Di dalam Pembentukan hukum melibatkan aktor formal dan non formal. Aktor formal adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Aktor non formal adalah masyarakat dan desa adat. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengaturan peluang partisipasi desa adat dan tahapan partisipasi desa adat dalam pembentukan hukum. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaturan yang jelas terkait dengan peluang partisipasi desa adat dalam pembentukan hukum. Pengaturan peluang partisipasi desa adat dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi tujuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Bentuk peluang partisipasi desa adat dalam pembentukan hukum pada tahap ante legislative, legislative dan post legislative.

Kata Kunci: *Peluang , Partisipasi, Desa Adat, Pembentukan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai kegiatan evaluasi.¹ Keikutsertaan diartikan

¹ Sirajuddin, didik Sukrino, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, h. 171. Lihat juga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka Jakarta, 2002, h. 331

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

sebagai peran dari masyarakat dalam melakukan pengawasan, kontrol dan juga dalam mempengaruhi para pembentuk hukum, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Pemahaman yang sama juga ditegaskan oleh Jazim Hamidi dan Ann Seidman yang menyatakan bahwa dalam pembentukan Perundang-undangan diperlukan stakeholders (pihak mempunyai kepentingan) untuk berperan serta seluas-luasnya dalam memberi masukan, kritik, dan ambil bagian dalam pembuatan keputusan.²

Berdasarkan pemahaman partisipasi di atas, maka perlu juga dipahami siapa saja yang boleh berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam pembentukan hukum yang partisipatif harus memberikan peluang partisipasi penuh kepada kelompok sosial, individu dan masyarakat.³ Dalam konteks ini, penguatan semua pihak atau aktor pembentukan hukum untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembentukan hukum. Sikap partisipasi aktif dari semua pihak ini sangat diperlukan untuk mewujudkan hukum yang responsif.

Di sisi lain, desa adat perlu dipahami, mengingat desa adat merupakan bagian dari masyarakat secara umum. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat dengan tata krama pergaulan dan adat istiadatnya setempat. Desa adat sebagai bagian dari masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat penelitian ini masih bersifat baru. Umumnya penelitian yang dilakukan hanya sebatas meneliti partisipasi masyarakat, namun dalam penelitian ini lebih fokus meneliti peluang partisipasi desa adat dalam pembentukan hukum. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peluang desa adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum, khususnya mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian dalam konteks ini yang perlu dikaji berkaitan dengan isu hukum yaitu 1) apakah desa adat mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. 2) Pada tahap apakah desa adat terlibat dalam pembentukan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif dipahami sebagai suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis yaitu Peraturan perundang-

²Jazim Hamidi, , *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publiher, 2008, h. 48. Lihat juga Ann Seidman at.al, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : Sebuah Panduan untuk pembuatan Rancangan Undang-Undang*, Diterjemahkan oleh Yohanes Usfunan dkk, Edisi kedua, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 200, h.8.

³Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum Dindonesia*, LP3ES Jakarta, 2006, h.25.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

undangan serta mencari problematik hukum yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut. Oleh karena itu penelitian hukum normative sering disebut penelitian hukum *dogmatic* atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*)⁴. Bernard Arif Sidharta⁵ menyebutkan dengan penelitian dogmatika hukum. Soetandyo Wignjosoebroto⁶ menyebut penelitian normative sebagai penelitian doctrinal. Penegasan metode penelitian doctrinal adalah bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang serta ajaran dan doktrin yang melandasinya. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan hukum normative yaitu mengenai kajian yuridis terhadap peluang partisipasi Desa Adat dalam pembentukan hukum.

2.1 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah sebagai langkah dalam pemecahan masalah (*problem solution*)⁷. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini⁸. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue approach*) digunakan untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan merespon dan mengatur keterlibatan desa adat dalam proses legislasi (pembentukan hukum).

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif⁹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU NRI Tahun 1945, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang serta Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, h.101-102.

⁵Bernard Arif Sidharta, "*Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*", dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, , 2009, h. 142.

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, "*Ragam-Ragam Penelitian Hukum*" dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009,h. 121.

⁷Abdulkadir Muhammad, , *op.cit* , 2004, h.101-102

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta, , 2005,h.92.

⁹H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2009, h 47.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan adalah semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, jurnal hukum dan lain sebagainya.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran melalui media internet. Bahan hukum yang telah didapat diinventarisir dan diidentifikasi, dicatat dalam sebuah kartu kemudian dilakukan kualifikasi terhadap bahan hukum tersebut. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji¹⁰ menyatakan bahwa perlu menyiapkan kartu kutipan untuk mencatat dan mengutip data beserta sumber dari mana data itu diperoleh (nama pengarang, judul buku/artikel, halaman dan sebagainya).

2.4 Teknik analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum atau hermeneutika hukum. Dalam konteks ini hermeneutika hukum merupakan metode penafsiran atas teks hukum yang berusaha menampilkan makna dan gagasan yang terkandung dalam teks hukum tersebut.¹¹ Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif dengan memaparkan secara lengkap pokok bahasan dengan menyuguhkan ulasan-ulasan kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peluang keterlibatan *desa adat* dalam pembentukan hukum

Dalam suatu pembentukan hukum, maka perlu di ungkap dulu apakah Desa Adat memiliki kekuatan dan peluang dalam proses pembentukan hukum. Berbicara kekuatan, berarti berbicara mengenai aset atau faktor-faktor yang dimiliki wilayah atau organisasi yang dapat mempermudah tercapainya tujuan atau visi yang ditetapkan. Kekuatan disini

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, h. 53.

¹¹Soelistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, Editor, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009. Lihat juga Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011 hal. 181.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

dapat berupa nilai positif atau kekuatan dari sumber daya manusia, dan sistem sosial-ekonomi-politik dari Desa Adat.

Selanjutnya berdasarkan pemahaman kekuatan tersebut, maka dapat dikatakan dalam partisipasi Desa Adat terkait dengan pembentukan hukum, Desa Adat mempunyai kekuatan yang merupakan aspek positif dari Desa Adat tersebut. Gambaran kekuatan tersebut meliputi: *pertama*, bahwa desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) mempunyai tata krama pergaulan masyarakat yang sosial religius yang taat pada adat istiadat yang diakui oleh konstitusi. Ini dapat dipahami bahwa Desa Adat merupakan masyarakat yang telah mendapat pengakuan baik secara yuridis (konstitusi) dan pengakuan secara sosiologis (fakta). Dengan demikian Desa Adat mempunyai hak konstitusional termasuk dalam berpartisipasi dalam pembentukan hukum. *Kedua*, Bahwa Desa Adat dalam perkembangan kekinian (globalisasi) tumbuh untuk mengembangkan diri yang berpatokan pada adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian Desa Adat mempunyai kekuatan berupa karakter yang sarat mempertahankan adat-istiadat dan kearifan lokal. Dalam proses pembentukan hukum, karakter seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan substansi hukum yang berkarakter nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan Desa Adat di Bali. Dengan demikian perda yang dibentuk dapat berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat Desa Adat. *Ketiga*, Bahwa dalam perkembangan kepengurusan Desa Adat juga dapat dilihat kekuatan atau nilai positifnya. Kekuatan tersebut tercermin dari SDM (sumber daya manusia) Desa Adat, yang dalam hal ini tercermin dalam SDM kepengurusan Desa Adat. Sebagian besar SDM kepengurusan Desa Adat di Bali merupakan orang-orang yang memiliki intelektual dan kecakapan dalam mengurus Desa Adat. Sebagai contoh banyak Desa Adat dipimpin oleh seorang bendesa yang mempunyai kelas pendidikan tinggi, minimal sarjana. Dengan memiliki kualitas kepemimpinan seperti itu maka cara pandang dan cara berfikir bendesa Adat akan berpengaruh pada cara pandang Desa Adat sendiri. Hal ini memberikan kekuatan bagi Desa Adat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Keempat, bahwa kekuatan Desa Adat juga dapat dilihat dari kondisi wilayahnya. Berbicara kondisi wilayah Desa Adat, maka kondisi wilayah Desa Adat di Bali adalah tidak sama, namun demikian hampir sebagian besar Desa Adat mengelola dan menghidupi sendiri kehidupan di Desa Adat. Sebagai contoh kondisi Desa Adat Kuta dan Desa Adat Sanur yang dianugerahi keadaan alam yang mendukung perekonomian Desa

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Adat, sehingga Desa Adat mampu memberdayakan dirinya untuk mensejahterakan *krama* Desa Adat. Dengan keberadaan yang demikian dipastikan banyak regulasi-regulasi yang dibuat oleh Negara yang ingin mengatur terkait dengan kondisi ataupun tatacara pengelolaan dari sumber daya alam tersebut. Dalam konteks inilah Desa Adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum.

Selanjutnya, setelah diketahui kekuatan Desa Adat dalam pembentukan hukuk, maka perlu juga diuraikan terkait dengan peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum. Berbicara peluang berarti berbicara mengenai kesempatan. Dalam konteks ini kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Dalam suatu pembentukan hukum, peluang Desa Adat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pertama, Aspek filosofis, bahwa dalam suatu pembentukan hukum, sudut pandang filosofis sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan pertimbangan dan alasan mengapa peraturan hukum tersebut dibentuk. Dalam pembentukan suatu peraturan hukum selalu mempertimbangkan pandangan hidup yang mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, aspek sosiologis, bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk agar suatu peraturan hukum tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut penjelasan mengenai fakta empiris. Penggalan secara mendalam dan masukan masyarakat terhadap nilai-nilai di atas sangat penting diperoleh oleh tim peneliti dan tim penyusun naskah akademik. Dasar sosiologis ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan akar-akar sosial dari suatu masyarakat. Dalam berbagai pengalaman, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, ternyata di kemudian hari ditolak oleh masyarakat dengan wujud sama sekali tidak mau menegakkan peraturan tersebut atau dilakukan melalui aksi demonstrasi untuk menentangnya. Hal ini merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Ketiga, aspek yuridis, bahwa dalam pembentukan suatu peraturan hukum, urgensi pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan hukum dimana suatu peraturan hukum mampu mengatasi masalah-masalah hukum dan dapat mengisi kekosongan hukum. Dengan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

demikian peraturan hukum dapat menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dasar yuridis dapat meliputi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil.

Dalam UU 12 Tahun 2011 juga dapat dilihat bahwa dalam suatu pembentukan hukum perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Matrik 1

Landasan	Uraian
Filosofis	Menggambarkan nilai filosofis yaitu pandangan hidup Bangsa, cita hukum yang bersumberkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Sosiologis	Dalam suatu pembentukan peraturan hukum selalu mempertimbangkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian fakta empiris sangat penting dalam menunjang pemetaan kebutuhan masyarakat.
Yuridis	Pertimbangan yuridis dipahami sebagai alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan hukum dibentuk dapat mengatasi masalah hukum dengan berdasarkan aturan hukum yang ada sehingga ada kepastian hukum.

Sumber diolah dari UU 12 Tahun 2011.

Berdasarkan pemahaman di atas maka pembentukan hukum yang baik harus melalui 3 aspek kajian, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Demikian juga dalam mengkaji peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum juga dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dalam aspek filosofis yang perlu direfleksikan adalah perlakuan yang adil kepada Desa Adat sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Peluang Desa Adat dapat dilihat dari apakah Desa Adat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Dasar keadilan dalam konteks peluang ini adalah memberikan ruang komunikasi pada Desa Adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Mengingat ruang komunikasi merupakan proses komunikasi di antara semua komponen masyarakat dalam ruang publik diharapkan akan melahirkan keadilan dan kesetaraan. Ruang komunikasi yang di dalamnya terdapat mekanisme partisipasi yang memungkinkan setiap orang dan kelompok untuk berkomunikasi secara inklusif dan setara untuk membangun dan pembentukan hukum¹².

¹²Ainur Rohman, [Fadillah Putra](#), Levi Riansyah dan Saiful Arif, 2009, *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Averroes Press, dapat juga dilihat dalam web :<http://www.avepress.com/politik-partisipasi-dan-demokrasi-dalam-pembangunan/>.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Aspek sosiologis terhadap peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum tercermin dalam kenyataan yang sesungguhnya mengenai praktek partisipasi Desa Adat dalam pembentukan hukum. Dalam praktek pembentukan hukum dan berdasarkan data konsultasi publik yang sudah dapat terkumpul mencerminkan bahwa secara sosiologis Desa Adat tidak terlibat dalam proses pembentukan hukum. Untuk ini dapat dibuat dalam bentuk matrik bahwa Desa Adat tidak ikut berpartisipasi.

Matrik 2

Data Diskusi Publik Tahun 2014-2015

Tahun	Pembahasan (Diskusi Publik)	Catatan
2014	Diskusi Publik tentang Ranperda Provinsi Bali Perlestarian Kain Tenun Tradisional	Desa Adat tidak terlibat
2014	Diskusi Publik tentang Ranperda Kota Denpasar tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Desa adat tidak terlibat.
2015	Diskusi Publik tentang Ranperda Kabupaten Badung tentang Pelayanan Publik	Desa Adat tidak terlibat.
2015	Diskusi Publik tentang Ranperda Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa adat tidak terlibat

Sumber diolah dari hasil-hasil diskusi publik 2014. 2015.

Berdasarkan data yang di atas, dapat dipahami bahwa Desa Adat tidak terlibat dalam proses pembentukan hukum, dimana akan berimplikasi terhadap hasil pembentukan hukum itu sendiri. Dengan tidak melibatkan Desa Adat dalam pembentukan hukum melalui prosedur tahapan yang partisipatif dan demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan akan:

Pertama: hukum yang dibentuk tersebut tidak akan efektif dalam arti tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan sebuah aturan yang dalam proses pembentukan hukum tanpa melibatkan partisipasi masyarakat (Desa Adat) maka dalam penegakan hukumnya akan terjadi keadaan dimana masyarakat cenderung melanggar aturan hukum. Dengan demikian aturan yang diterapkan tidak akan efektif.

Kedua: hukum yang dibentuk tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan atau gagal sejak dini. Besar kemungkinan pembentukan hukum yang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

terkesan kejar tayang tersebut pada pertengahan jalan harus segera direvisi karena sebagian besar pasalnya ternyata tidak implementatif.

Ketiga : hukum yang dibentuk tersebut tidak responsif. Apabila sejak semula dalam proses pembentukan hukum tanpa melibatkan berbagai *stakeholders* (Desa Adat), maka akan mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Keempat: tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum dapat menimbulkan ekses sosiologis bagi masyarakat berupa perilaku main hakim sendiri karena aturan yang dibentuk tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ke empat point di atas, yang menggambarkan bahwa keberlakuan hukum tidak akan efektif apabila dalam proses pembentukan hukum tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu seharusnya dalam proses pembentukan hukum, partisipasi masyarakat wajib dilaksanakan oleh pembentuk hukum. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum, menunjukkan telah dilakukannya asas demokrasi dan asas transparansi.

Pelaksanaan asas demokrasi dan asas transparansi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum tercermin dalam diaturnya partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya partisipasi Desa Adat dalam peraturan perundang-undangan maka dapat diartikan bahwa secara yuridis peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada Desa Adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum.

Peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum secara yuridis dapat dilihat peluang Desa Adat dari peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya akan dituangkan ke dalam matrik berikut.

Matrik 3

Dasar Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI 1945	Catatan
Pasal 27 ayat (1)	Kata "bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan" merupakan pengakuan persamaan kedudukan masyarakat di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian ada dasar masyarakat untuk berpartisipasi.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pasal 28 C ayat (2)	Kata "memperjuangkan haknya secara kolektif" merupakan dasar pengakuan masyarakat untuk ikut membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dasar yang mengatur partisipasi masyarakat untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.
Pasal 28 D ayat (3)	Kata "kesempatan yang sama" merupakan dasar pengakuan hak masyarakat menggunakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Pasal 28 E ayat (2)	Kata " menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya " merupakan salah satu refleksi keterbukaan dalam penyampaian pikiran dan sikap. Penyampaian dimaksud merupakan hak masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan demikian ada dasar pengakuan partisipasi masyarakat.
Pasal 28 E ayat (3)	Kata " mengeluarkan pendapat " merupakan salah satu hak dari masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian "mengeluarkan pendapat" merupakan dasar dalam pengaturan partisipasi masyarakat.
Pasal 28 H ayat (2)	Kata " persamaan dan keadilan "

Sumber diolah dari UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pada matrik di atas, dapat dipahami bahwa ada dasar pengaturan secara yuridis terkait peluang Desa Adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Pengaturan dalam Konstitusi memberi landasan hukum pelaksanaan peluang partisipasi Desa Adat yang merupakan hak dasar warga negara. Selanjutnya pengaturan peluang partisipasi Desa Adat juga diatur dalam tataran Undang-Undang, untuk itu dapat dilihat dalam matrik berikut :

Matrik 4

Dasar Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam UU

UU	Norma Pasal	Catatan
UU 26 /2007 Tentang Penataan Ruang	Pasal 65 diatur mengenai peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Salah satu peranserta masyarakat tersebut adalah partisipasi dalam penyusunan kebijakan penataan ruang. Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur partisipasi masyarakat. • Diatur dengan masyarakat adat.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
UU 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara	Pasal 7 ayat (1) angka I juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	Diatur partisipasi masyarakat dalam usaha pertambangan.
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 70 ayat (1) : dimaknai adanya peran serta aktif masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Diatur partisipasi masyarakat
UU 12/2011	Dalam Pasal 96 diatur mengenai peranserta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam memberikan masukan dapat berupa rapat dengan pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi dengan mudah oleh masyarakat.	Diatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
	Penjelasan Pasal 96 ayat (3) : yang termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat hukum adat.	Yang dimaksud masyarakat dalam Pasal 96 adalah termasuk masyarakat adat dalam konteks ini desa pakaman
UU 1/2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 14 dipahami bahwa dalam mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melibatkan masyarakat.	• Diatur partisipasi masyarakat.
UU 6/2014 Tentang UU Desa	Pasal 68 diatur mengenai hak masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan maupun tertulis dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Pasal 69 dimaknai bahwa setiap rancangan peraturan desa wajib untuk dikonsultasikan pada masyarakat desa dan masyarakat desa	• Diatur partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam pembentukan peraturan desa.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	juga berhak dalam memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan desa tersebut.	
UU 23/2014	Pasal 354 dipaani bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat . Bentuk partisipasi masyarakat adalah terlibat dalam penyusunan Perda.	Diatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan PERDA dan Kebijakan Daerah

Sumber diolah dari beberapa UU.

Matrik 5

Dasar Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Perpres,PP, Permendagri.

Aturan	Pasal	Catatan
Perpres 87/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Pasal 188 dipahami bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat mempunyai hak dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan dengan cara konsultasi publik.	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pasal ini diatur tentang partisipasi masyarakat
PP 68/2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Pasal 5 dipahami bahwa peran masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none">• Diatur partisipasi masyarakat.
Permendagri 56/2014 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah	Pasal 3 Perencanaan tata ruang daerah, melibatkan peran masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Diatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Sumber diolah dari Perpres, PP dan Permendagri.

Berdasarkan matrik di atas dapat dipahami bahwa Desa Adat secara yuridis mendapat peluang untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan menandakan bahwa Negara tidak boleh mengabaikan Desa Adat dalam proses pembentukan hukum.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3.2 Tahap-Tahap Partisipasi Desa Adat Dalam Pembentukan Hukum

Pada prinsipnya di dalam proses pembentukan hukum dibagi dalam tiga tahap yaitu: *ante legislative*, *legislative* dan *post legislastif*. Pada ke tiga tahapan tersebut ada peluang masyarakat untuk berpartisipasi baik berpartisipasi langsung maupun tidak langsung atau berpartisipasi secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks ini masyarakat yang dipahami adalah desa adat, dimana desa adat memang merupakan bagian dari masyarakat secara lebih luas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa desa adat berhak berpartisipasi dalam pembentukan hukum dari sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis.

Berdasarkan sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis, maka partisipasi Desa Adat dalam proses legislasi dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat pada tahap *ante legislative*

Pada tahap *ante legislative* ada empat bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dalam proses legislasi, yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian

Di dalam konteks penelitian, desa adat dapat terlibat mulai dari memetakan dan mengkaji persolan yang ada dalam masyarakat sampai ada alasan dan argumen bahwa pemecahan suatu persolan yang terdapat dalam masyarakat perlu diatur dalam produk hukum. Dalam konteks ini produk hukum daerah (Perda). Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan institusi, LSM maupun pemerintah. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam format laporan penelitian sehingga dapat ditindak lanjuti dalam proses legislasi.

b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar

Partisipasi masyarakat atau partisipasi desa adat juga dapat dikemas dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar sebagai tindak lanjut dari hasil. Diskusi, lokakarya dan seminar ini akan memberikan sumbangan yang penting dalam pengkajian terhadap persoalan materi muatan suatu produk hukum. Dalam konteks ini desa adat dapat memberikan masukan, argumen maupun kritik terhadap hasil penelitian. Tujuan dilakukan diskusi, lokakarya dan seminar ini adalah untuk memperkaya wawasan dan materi muatan sehingga sangat membantu dalam proses penuangan naskah akademik suatu produk hukum.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usul inisiatif

Partisipasi desa adat dapat juga dilakukan pada pengajuan usul inisiatif. Usul inisiatif desa adat dapat juga dilakukan tanpa didahului penelitian, diskusi dan lokakarya, namun alangkah baiknya usul inisiatif tersebut didahului dengan adanya penelitian, diskusi, lokakarya, seminar terhadap suatu permasalahan ataupun persoalan yang penting untuk dituangkan dalam bentuk produk hukum. Pengajuan usul inisiatif dari masyarakat dapat diajukan melalui jalur eksekutif dan legislatif untuk dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan program legislatif daerah maupun nasional.

d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu Produk hukum

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan produk hukum dapat dilakukan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang terakhir dalam tahap ante legislatif. Dalam arti setelah melakukan penelitian, pengusulan usul inisiatif maka pada gilirannya masyarakat dapat menuangkan hasil penelitian dalam Rancangan. Dimana dalam sebuah Rancangan Produk hukum didahului dengan adanya naskah akademis.

2. Partisipasi masyarakat pada tahap *legislative*.

Pada tahap legislatif terdapat enam bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, dalam konteks ini termasuk dalam partisipasi desa adat dalam proses legislasi. Adapun 6 bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah:

- a. audiensi;
- b. RUU alternatif;
- c. masukan melalui media cetak;
- d. masukan melalui media elektronik;
- e. unjuk rasa; dan
- f. diskusi, lokakarya dan seminar.

Secara ringkas keenam bentuk partisipasi masyarakat diuraikan sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi

Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi ini dapat dilakukan masyarakat baik atas permintaan langsung legislatif maupun atas keinginan masyarakat/ desa adat sendiri untuk audiensi. Apabila audiensi ini atas permintaan legislatif maka partisipasi masyarakat

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dilakukan melalui rapat dengan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam tahap audiensi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian Rancangan produk hukum alternatif ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat rancangan produk hukum yaitu RUU maupun Ranperda alternatif. Penyusunan rancangan produk hukum alternatif ini dilakukan dengan mengikuti format yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyampaian RUU ataupun Ranperda alternatif ini harus dilakukan pada tahap awal pembahasan Rancangan di lembaga legislatif, yaitu, bersamaan dengan dilakukannya pengajuan RUU kepada DPR baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun DPR/DPRD sendiri.
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak dapat dilakukan oleh masyarakat maupun desa adat melalui opini terhadap suatu persoalan yang sedang hangat dibahas oleh lembaga legislatif. Opini itu dapat berupa artikel, wawancara, pernyataan-pernyataan serta tajuk berita di pada media cetak, namun kelemahannya adalah hasil masukan dari masyarakat bisa tidak sampai ke tangan legislatif. Cara lain dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan mengirimkan melalui via pos berkaitan dengan masukan, argumen dari masyarakat.
- d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik
Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Dialog melalui media elektronik ini mempunyai jangkauan yang cepat luas dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membahas persoalan yang menyangkut masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk media elektronik ini perlu digalakkan dalam proses pembentukan UU sehingga akan menyadarkan masyarakat tentang hak dan kewajibannya yang akan diatur dalam UU.
- e. Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa
Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka mendukung, menolak maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan UU. Unjuk rasa ini dapat dilakukan baik secara individual maupun

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

kelompok masyarakat dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, pengaruh dari unjuk rasa ini akan lebih berhasil dalam mempengaruhi lembaga legislatif jika dilakukan oleh masyarakat yang langsung berkepentingan, dengan jumlah yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Unjuk rasa ini merupakan ungkapan kebebasan individu warga negara atas kepentingannya yang akan diatur dalam suatu UU. Jadi, unjuk rasa ini tidak dapat hanya dianggap sebagai angin lalu dalam proses pembentukan UU.

f. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi muatan yang sedang dibahas oleh legislatif. Diskusi, lokakarya dan seminar ini dilakukan ketika proses pembentukan produk hukum tengah memasuki pembahasan, maka narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari kalangan para ahli, akademisi, pakar maupun pengamat, tetapi sebaiknya mendatangkan juga politisi dan para tokoh masyarakat termasuk desa adat. Dengan demikian, diskusi, lokakarya dan seminar, akan mendapatkan gambaran yang utuh terhadap persoalan yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif.

3. Partisipasi masyarakat pada tahap *post legislative*

Tahap post legislatif ini tidak dapat dimasukkan dalam proses legislasi atau pembentukan peraturan hukum. Akan tetapi, justru pada tahap post legislatif inilah produk hukum yang berupa UU ataupun Perda mempunyai makna dalam kehidupan riil masyarakat. Dalam konteks ini suatu produk hukum yang berupa UU dan Perda telah final dibentuk. Dalam arti telah disahkan dan ditetapkan sebagai UU ataupun Perda. Dalam tahapan post legislatif ini dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu :

a. Unjuk rasa terhadap UU yang telah ditetapkan

Adanya UU baru dapat disikapi beraneka ragam oleh masyarakat, karena sangat mungkin dengan UU yang baru itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap lahirnya UU baru yang diwujudkan dengan unjuk rasa. Akan tetapi, sayangnya, unjuk rasa terhadap UU baru itu lebih ditujukan untuk menolak UU dari pada mendukung munculnya UU baru. Padahal sebenarnya, unjuk rasa juga dapat dilakukan terhadap adanya UU baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, unjuk rasa ini merupakan suatu

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU –khususnya unjuk rasa yang menolak – karena akan mendorong penyempurnaan atau penggantian dengan UU yang lebih baik.

b. Tuntutan pengujian terhadap UU

Suatu UU yang telah diproduksi oleh lembaga legislatif dan telah disahkan oleh Presiden serta dimuat dalam lembaran negara mempunyai kekuatan mengikat dan sah berlaku di masyarakat. Meskipun demikian, dalam suatu negara demokrasi – termasuk di Indonesia – rakyat mempunyai keleluasaan untuk menanggapi. Bagi masyarakat yang belum atau tidak puas dengan lahirnya UU dapat melakukan permohonan uji materiil terhadap UU tersebut. Sebab, konsepsi Negara Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip Negara Hukum dengan konstitusi sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam Negara. Oleh karena itu, adanya uji materiil terhadap Undang-Undang adalah dimaksudkan dalam rangka menjaga tegaknya konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan dari organ pembuat UU. Oleh karena itu tuntutan uji material terhadap UU adalah hak masyarakat yang harus tetap dijamin dalam mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU.

c. Sosialisasi UU

Dalam rangka menyebarkan produk UU yang baru ditetapkan, maka masyarakat dapat berpartisipasi melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan lahirnya UU baru. Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi dsb. Dengan cara demikian, maka keberadaan suatu UU tidak hanya diketahui oleh kalangan elit yang berkecimpung langsung dalam proses pembentukan UU, tetapi akan cepat dikenal luas oleh masyarakat. Jadi, sosialisasi UU kepada masyarakat luas merupakan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU.

Berdasarkan Pemahaman di atas maka peluang Desa Adat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum selain di atur dalam tataran yuridis juga merupakan suatu keharusan bagi Desa Adat untuk terlibat dalam pembentukan hukum terkait dengan implementasi hukumnya akan kembali pada Desa Adat tersebut.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan yaitu :

- a. Bahwa peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mendapat posisi yang kuat yang berlandaskan pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam pembentukan hukum yang berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis menjadikan suatu pembentukan hukum memenuhi tujuan hukum, kebutuhan masyarakat dan konsistensi hukum. Dalam aspek filosofis peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum memenuhi unsur keadilan, aspek sosiologis melihat peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum dalam arti sebenarnya atau kenyataann. Sedangkan aspek yuridis melihat peluang Desa Adat dalam pembentukan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian tersebut, maka peluang Desa Adat sangat kuat dalam hal partisipasi dalam pembentukan hukum.
- b. Peluang partisipasi Desa Adat dalam pembentukan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap ante legisltive, tahap legislative dan tahap post legislative.
Tahap ante legislative terdiri dari: dalam bentuk penelitian, dalam bentuk diskusi, Iokakarya dan seminar, pengajuan usul inisiatif, dalam bentuk perancangan terhadap suatu RUU. Tahap legislative terdiri dari : audensi/ RDPU; RUU alternatif; masukan melalui media cetak; masukan melalui media elektronik; unjuk rasa; dandiskusi, lokakarya dan seminar dahap post legislative yang meliputi Unjuk rasa terhadap UU baru, Tuntutan pengujian terhadap UU, Sosialisasi UU.

5. SARAN

- a. Perlu diatur secara tegas atau dibuat norma hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa desa adat juga mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum.
- b. Perlu dibuatkan model yang jelas terkait dengan partisipasi desa adat dalam setiap proses pembentukan hukum.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

6. DAFTAR PUSTAKA

Ann Seidman at al, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : Sebuah Panduan untuk pembuatan Rancangan Undang-Undang*, Diterjemahkan oleh Yohanes Usfunan dkk, Edisi kedua, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001.

Ainur Rohman, Fadillah Putra, Levi Riansyah dan Saiful Arif, *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Averroes Press, dapat juga dilihat dalam web : <http://www.avepress.com/politik-partisipasi-dan-demokrasi-dalam-pembangunan>, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta, 2007.

Bernard Arif Sidharta, "*Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*", dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Jazim Hamidi, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publiher, Jakarta, 2008

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press Khasanah Peradaban Hukum & Konstitusi, 2013.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Dindonesia*, LP3ES Jakarta, 2006.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Judul asli : Law & Society in transition: toward Responsive law*, Nusamedia Bandung, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta, 2005.

Sirajuddin, didik Sukrino, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.

Soetandyo Wignjosoebroto, "*Ragam-Ragam Penelitian Hukum*" dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.

Soelistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, Editor, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.

Zainuddin Ali, H, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 177).